

“HARGA ROKOK NAIK YA?”

SATU DILEMA BERBAGAI MAKNA UNTUK DIA, KITA DAN MEREKA

Rokok, perokok dan merokok? Saya kira bukan hal aneh dan istimewa lagi untuk membahas hal semacam ini. Kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, namun tetap saja banyak perokok di dunia ini, termasuk di Indonesia. Benar kan? Ya hal tersebut benar adanya. Data Kementerian Kesehatan RI telah menunjukkan fakta bahwa peningkatan prevalensi perokok dari 27% pada tahun 1995, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013. Artinya, jika 20 tahun yang lalu dari setiap 3 orang Indonesia 1 orang di antaranya adalah perokok, maka kini dari setiap 3 orang Indonesia 2 orang di antaranya adalah perokok (Kemenkes, 2012).

Adanya isu akan dinaikkannya harga rokok hingga lebih dari Rp 50,000 per bungkus, yang katanya bertujuan untuk menekan angka perokok pemula, yang konon pula agar masyarakat bawah jadi berhenti membeli rokok, entah mengapa terasa masih “digantung”. Belum ada kejelasan akan hal tersebut. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu dari berbagai macam argumentasi yang membandingkan harga rokok di Indonesia dengan negara lain, membuat perjalanan kabar burung ini semakin tak terarah.

Wacana kenaikan harga rokok hingga dua kali lipat atau menjadi Rp 50.000 per bungkus ini memang tengah dikaji oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) RI, namun meskipun demikian, hal ini masih menimbulkan dilema untuk 3 pihak utama, yaitu dia, kita dan mereka.

Dilema untuk Dia, Perokok

Selama ini, harga rokok di Indonesia paling murah dibanding negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Laos. Di Singapura, harga rokok bisa mencapai Rp 120.000 per bungkus, sedangkan di Indonesia, hanya dengan Rp 12.000 sudah bisa mendapat sebungkus rokok (Maharani, 2016a). Hal ini membuat banyak anak usia sekolah yang mudah membeli rokok.

Tingginya harga rokok Indonesia diharapkan dapat mencegah anak usia sekolah dan masyarakat kurang mampu untuk membeli rokok. Selain itu, langkah pengendalian tembakau harus diperkuat, misalnya dengan melarang iklan rokok di televisi. Apalagi, di banyak negara iklan rokok dilarang dengan sangat ketat.

Meski demikian, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, menilai sekadar menaikkan harga rokok tak cukup untuk menurunkan jumlah perokok. Kebijakan itu, menurutnya, perlu dibarengi rangkaian kebijakan pendukung; antara lain menyediakan terapi bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok (Anugerah, 2016).

Hal ini tentu menjadi dilema bagi para perokok, mengingat upaya menghentikan kebiasaan merokok tidak dapat dilakukan dalam periode singkat. Namun di satu sisi, apabila mereka terus-terusan merokok, maka mereka akan dikejar oleh tarif rokok yang sangat mahal, sehingga para perokok perlu dana ekstra untuk mendapatkannya. Nah, hal ini yang akan menjadi ketakutan di masyarakat. Bila para perokok umumnya berasal dari masyarakat ekonomi bawah, lalu dimana mereka akan mendapat uang ya?

Dilema untuk Kita, Masyarakat Umum

Usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkus merupakan hasil studi dari Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany. Studi tersebut mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan perokok akan berhenti merokok jika harga rokok dinaikkan hingga dua kali lipat dari harga normal. Selain itu, 80 persen dari total sampel setuju jika harga rokok dinaikkan. "Belum lagi ada tambahan dana Rp 70 triliun untuk bidang kesehatan," terang Hasbullah (Maharani, 2016b).

Ya, tentu sebuah keuntungan bagi kita, para perokok pasif dan masyarakat yang "membenci" rokok. Kenaikan harga rokok diyakini akan berhilir pada berkurangnya jumlah perokok, sehingga anggaran dana untuk merawat para perokok dapat disalurkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dilema untuk Mereka, Pelaku Industri Rokok

Kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu signifikan akan berdampak negatif bagi industri rokok, seperti kecenderungan kebangkrutan perusahaan, bahkan semakin maraknya peredaran dan penyelundupan rokok ilegal. Tarif cukai rokok di Indonesia hendaknya dapat naik secara bertahap sesuai dengan peta jalan (*roadmap*) pemerintah, sehingga tidak menimbulkan efek buruk yang berakibat pada kerugian ekonomi.

Seperti yang disampaikan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai pada 17 Agustus 2016 melalui CNN Indonesia, harga rokok jadi Rp 50 ribu per bungkus adalah salah satu referensi yang dapat dikomunikasikan (Anugerah, 2016; Maharani, 2016b). Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan usulan tersebut bukan saja dari sisi kesehatan, namun juga dari aspek ekonomi, seperti industri, petani dan keberlangsungan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, masalah ini harus dikomunikasikan dengan seluruh *stakeholder*, baik yang pro kesehatan, pro industri, ataupun pro pada para petani, karena pasti akan ada tarik ulur di situ. Kalau cuma mendengarkan salah satunya, tentu jawaban akan hal ini menjadi berat sebelah. Pada akhirnya, entah harga rokok akan dinaikkan atau tidak, hal yang terpenting tetaplah komunikasi.

Jangan pernah ciptakan dilema untuk dia, kita dan mereka!

Usulkan, diskusikan, komunikasikan!

